



RENCANA STRATEGIS

2025-2029

**DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS**





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman strategis bagi dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun ke depan. Dengan berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan, pertanian, dan pangan yang berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing tinggi, demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penyusunan Renstra ini, kami telah melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah terkait, pemangku kepentingan, serta masyarakat, untuk memastikan bahwa dokumen ini mencerminkan kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada. Masukan dan kontribusi yang diberikan menjadi dasar yang berharga bagi penyempurnaan dokumen ini.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan sektor perikanan, pertanian, dan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat menjadi pendorong semangat untuk terus bekerja keras demi tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 15 September 2025



KEPALA DINAS PERIKANAN
PERTANIAN DAN PANGAN,

ROVANIYADI, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 197107262002121005

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Aparatur	13
2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan	19
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	28
2.5. Permasalahan dan Isu Strategis	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ...	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB V PENUTUP	77

Daftar Tabel

TABEL 2.1	Sumber Daya Aparatur DPPP Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	14
TABEL 2.2	Sumber Daya Aparatur DPPP berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	16
TABEL 2.3	Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
TABEL 2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung	18
TABEL 2.5	Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2024.....	21
TABEL 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.....	24
TABEL 2.7	Isu Strategis.....	31
TABEL 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra	35
TABEL 3.2	Penahapan Renstra PD	36
TABEL 3.3	Arah dan Kebijakan Renstra.....	39
TABEL 4.1	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	44
TABEL 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	45
TABEL 4.3	Indikator Kinerja Utama	74
TABEL 4.5	Indikator Kinerja Kunci	74

Daftar Gambar

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas	9
-------------------	--	----------

Daftar Lampiran

LAMPIRAN I Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 266
Tahun 2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 - 2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, dan pangan yang menjadi andalan pembangunan daerah. Sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan sumber daya alam laut dan memiliki lahan pertanian yang subur, sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan daerah. Namun, untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi ini, diperlukan arah pembangunan yang terencana dan terukur agar dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 menjadi langkah penting sebagai pedoman perencanaan lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada berbagai tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim, keterbatasan akses teknologi, dan kebutuhan akan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor perikanan, pertanian, dan pangan. Selain itu, Renstra ini juga merespons dinamika kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas produk perikanan dan pertanian, pengembangan sistem agribisnis yang inovatif, serta peningkatan akses pasar bagi hasil produksi. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029, Renstra ini dirancang untuk menyelaraskan program kerja DPPP dengan visi dan misi pembangunan daerah secara holistik.

Renstra DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional yang relevan, termasuk peningkatan ketahanan pangan nasional dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang berbasis data dan partisipasi masyarakat, Renstra ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi perencanaan program dan kegiatan yang adaptif terhadap tantangan global, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kepulauan Anambas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:



1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
24. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 629);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPP. Renstra ini



bertujuan untuk mengarahkan program dan kegiatan agar sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis dalam pengelolaan sektor perikanan, pertanian, dan pangan. Penyusunan Renstra DPPP bertujuan untuk merumuskan kebijakan strategis yang dapat mengoptimalkan potensi sektor perikanan, pertanian, dan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Potensi alam yang melimpah di daerah ini harus dikelola dengan pendekatan yang adaptif dan inovatif, mengingat adanya tantangan besar seperti perubahan iklim, keterbatasan teknologi, serta rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di sektor ini.
2. Menyinergikan program dan kegiatan DPPP dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dan kebijakan pembangunan nasional. Renstra DPPP harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, untuk memastikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan yang direncanakan juga perlu mengacu pada kebijakan pembangunan nasional yang relevan, seperti penguatan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan menyinergikan program dan kebijakan ini, diharapkan dapat tercapai hasil yang maksimal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas berbasis data yang terukur dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra DPPP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPP. Salah satu upaya utama adalah dengan menggunakan perencanaan berbasis data yang terukur dan sistematis. Dengan data yang valid dan teranalisis, program dan kegiatan yang dijalankan dapat lebih terarah dan fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Perencanaan yang berbasis pada indikator kinerja yang jelas juga akan memudahkan dalam mengukur capaian dan melakukan



evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Mendorong pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Renstra DPPP diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan di sektor perikanan, pertanian, dan pangan. Fokus utama adalah pada peningkatan ketahanan pangan daerah, yang merupakan prioritas utama dalam menghadapi dinamika kebutuhan pangan yang terus berkembang. Selain itu, pemberdayaan masyarakat, terutama para petani dan nelayan, juga harus menjadi perhatian utama dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi, pelatihan, dan pasar. Peningkatan nilai tambah hasil produksi serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan akan memperkuat daya saing daerah dan menciptakan keberlanjutan ekonomi di masa depan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik petani, nelayan, maupun konsumen. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan isu-isu



strategis yang dihadapi dan harus ditangani oleh DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan perencanaan di tingkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini secara mendalam menguraikan perumusan tujuan dan sasaran yang dirancang untuk dicapai dalam rentang waktu lima tahun. Perumusan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi, serta proses perumusan visi dan misi jangka menengah selama lima tahun, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta berbagai isu strategis yang telah diidentifikasi. Setiap sasaran yang ditetapkan kemudian dilengkapi dengan strategi dan arah kebijakan yang dirancang secara spesifik. Strategi dan arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan dan acuan utama untuk memastikan upaya pencapaian sasaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV menjelaskan rencana program dan kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan disertai dengan indikator kinerja, target kelompok sasaran, serta alokasi pendanaan indikatif sebagai acuan pelaksanaannya. Menjelaskan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dan selaras dengan tujuan serta sasaran RPJMD. Selain itu, bab ini juga menguraikan indikator kinerja yang secara langsung menggambarkan capaian yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan evaluasi pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perikanan, pertanian dan pangan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Pertanian serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah pembangunan suatu daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi:

- Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan, pertanian dan ketahanan pangan;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- Pengelolaan barang milik Daerah;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkup tugasnya.

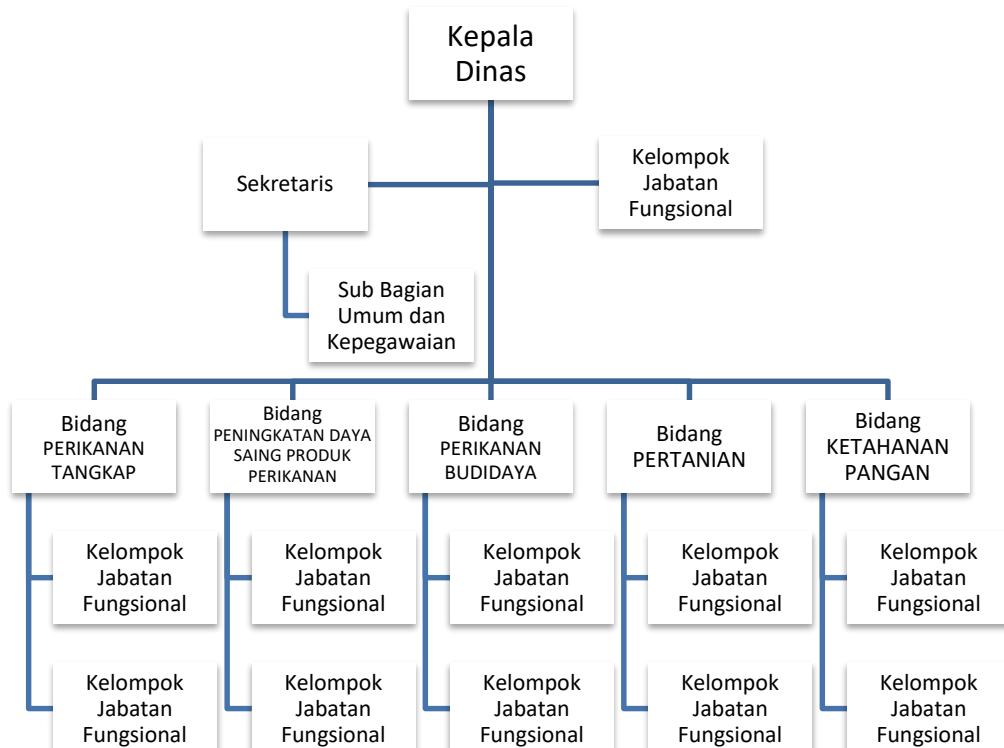
Susunan Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;
- e. Bidang Pertanian;
- f. Bidang Ketahanan Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam struktur organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), Adapun UPT Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. UPT Pusat Kesehatan Hewan ;
- b. UPT Perbenihan Ikan;
- c. UPT Balai Benih Pertanian Terpadu;
- d. Balai Penyuluhan Pertanian.

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kepulauan Anambas



Dalam hal membantu pelaksanaan tugas Kepala Dinas, struktur di bawahnya memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPP.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPPP;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPPP;
3. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

Sekretariat membawahi:

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:
1. melaksanakan reformasi birokrasi internal DPPP;
 2. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 3. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan DPPP;
 4. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 5. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 6. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
 7. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat

- menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPPP;
8. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DPPP;
 9. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
 10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
4. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perikanan tangkap;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

III. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
4. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perikanan budidaya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

IV. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan



sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan daya saing produk;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing produk;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan daya saing produk;
4. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang peningkatan daya saing produk;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

V. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang pertanian mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian;
4. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pertanian;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.

VI. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
4. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPPP.



2.2 Sumber Daya Aparatur

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur yang tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat hingga bidang-bidang teknis memiliki keahlian di bidang administrasi, perencanaan, urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Sumber daya aparatur DPPP berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan terkait urusan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan secara optimal, terukur, dan akuntabel.

Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DPPP) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan terkait urusan perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPPP didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten di berbagai bidang. DPPP memiliki aparatur yang tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat hingga bidang-bidang teknis. Aparatur ini memiliki keahlian di bidang:

1. Administrasi: Aparatur yang memiliki keahlian di bidang administrasi dapat membantu dalam pengelolaan dokumen, keuangan, dan kepegawaian.
2. Perencanaan: Aparatur yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dapat membantu dalam menyusun rencana strategis dan operasional untuk mencapai tujuan DPPP.
3. Urusan Ketahanan Pangan: Aparatur yang memiliki keahlian di bidang ketahanan pangan dapat membantu dalam mengembangkan program-program untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan.
4. Pertanian: Aparatur yang memiliki keahlian di bidang pertanian dapat membantu dalam mengembangkan program-program untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian.
5. Perikanan: Aparatur yang memiliki keahlian di bidang perikanan dapat membantu dalam mengembangkan program-program untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan.

Sumber daya aparatur DPPP berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan terkait urusan perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan secara optimal, terukur, dan akuntabel. Beberapa peran sumber daya aparatur DPPP adalah:

1. Mengembangkan Program-Program: Sumber daya aparatur DPPP dapat membantu dalam mengembangkan program-program untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dan

perikanan, serta meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan.

2. Mengelola Sumber Daya: Sumber daya aparatur DPPP dapat membantu dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan DPPP.
3. Mengawasi dan Mengevaluasi: Sumber daya aparatur DPPP dapat membantu dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program-program untuk memastikan bahwa tujuan DPPP tercapai.

Sumber Daya Aparatur DPPP per Januari 2025 berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) orang terdiri dari 52 Pegawai Negeri Sipil dan 77 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi aparatur DPPP Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Sumber Daya Aparatur DPPP
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan**

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Dinas	1 Orang
Pembina Tingkat I/ IV.a	Sekretaris	1 Orang
Penata Tk.I/ III.d	Kepala Bidang	5 Orang
Penata Tk.I/ III.d	Kepala Sub Bagian Umum	1 Orang
Penata Tk.I/ III.d	Kepala UPT	1 Orang
Penata Tk.I/ III.c	Kepala UPT	2 Orang
Penata Tk. I/ III.d	Fungsional	6 Orang
Penata/ III.c	Fungsional	3 Orang
Penata Muda Tingkat 1/ III.b	Kasubbag TU UPT	3 Orang
Penata Muda Tk. I/ III.b	Staf	8 Orang
Penata Muda/ III.a	Staf	16 Orang
Pengatur Tingkat I/ II.d	Staf	4 Orang
Pengatur/ II.c	Staf	1 Orang
PPPK/ IX	Staf	53 Orang
PPPK/ V	Staf	24 Orang
Jumlah		129



Sumber daya aparatur di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) berdasarkan kualifikasi golongan dan jabatan menunjukkan distribusi yang beragam. Pada level tertinggi, terdapat 1 orang pada golongan Pembina Utama Muda dengan jabatan Eselon II.b. Golongan Pembina Tingkat I, yang menjabat Eselon III.a, diisi oleh 1 orang. Selanjutnya, pada golongan Pembina dengan jabatan Eselon III.b terdapat 5 orang, sementara pada golongan Penata Tingkat I dengan jabatan yang sama terdapat 4 orang. Jabatan Eselon IV.a diisi oleh 5 orang dari golongan Penata Tingkat I dan 11 orang dari golongan Penata.

Sumber daya aparatur di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) memiliki distribusi yang beragam berdasarkan kualifikasi golongan dan jabatan. Struktur organisasi DPPP memiliki hierarki yang jelas, dengan level tertinggi diisi oleh Eselon II.b dan diikuti oleh Eselon III.a, III.b, dan IV.a.

1. Ketersediaan Sumber Daya: DPPP memiliki sumber daya aparatur yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Kualifikasi dan Pengalaman: DPPP memiliki aparatur yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang tinggi, terutama di level tertinggi.
3. Pengembangan Karir: DPPP dapat mempertimbangkan pengembangan karir bagi aparatur yang memiliki potensi dan kualifikasi yang baik.

Pada posisi staf, terdapat distribusi yang lebih besar, yakni 7 orang pada golongan Pengatur Muda Tingkat I, 8 orang pada golongan Pengatur Muda, dan 10 orang tenaga PPPK. Dari perspektif statistik, distribusi ini menunjukkan pola yang meningkat secara signifikan pada golongan staf, dengan jumlah tenaga honorer yang paling dominan. Dengan demikian, DPPP dapat memanfaatkan sumber daya aparatur yang ada untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja organisasi.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai DPPP tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sumber Daya Aparatur DPPP berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan	
1	PNS : 52 Orang	S2	: 2 Orang
		S1	: 35 Orang
		D4	: 3 Orang
		D3	: 1 Orang
		D2	: 1 Orang
		SMA/SMK	: 10 Orang
2	PPPK : 77 Orang	S1	: 51 Orang
		D4	: 2 Orang
		SMA/SMK	: 24 Orang
		SMP/SLTP	: 0 Orang
		SD	: 0 Orang
Jumlah		129	

Dari total 52 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang memiliki kualifikasi pendidikan S2, 35 orang berpendidikan S1 atau D4 3 orang, 1 orang lulusan D3, D2 sebanyak 1 orang dan 10 orang merupakan lulusan SMA atau SMK. Sementara itu, dari 77 PPPK, mayoritas yakni 51 orang memiliki kualifikasi pendidikan S1, D4 2 orang, dan 24 orang berpendidikan SMA atau SMK.

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dalam kualifikasi pendidikan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di DPPP. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas PNS memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4, yaitu sebanyak 38 orang (73,1%). Hal ini menunjukkan bahwa PNS di DPPP tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Dengan demikian, instansi dapat memanfaatkan data kualifikasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan karir bagi PNS dan PPPK.

c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor DPPP didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan tenaga PPPK berdasar kelamin.

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	34	18
PPPK	49	28
Jumlah	83	46

Tabel 2.3. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin di lingkungan DPPP sebanyak 40 orang laki-laki dengan rincian PNS sebanyak 32 orang dan PPPK 8 orang. Perempuan sejumlah 19 orang dengan rincian PNS 17 orang dan PPPK 2 orang, ini menunjukkan potensi untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender yang lebih kuat di masa depan. Kesetaraan gender merupakan elemen penting dalam peningkatan kinerja organisasi, karena memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, tetapi juga mendorong keberagaman perspektif, inovasi, dan kolaborasi yang lebih baik dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dukungan terhadap kesetaraan gender di DPPP juga menjadi wujud komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Kinerja organisasi memiliki hubungan yang erat dengan dukungan sumber daya aset, terutama sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, teknologi informasi yang mutakhir, dan fasilitas pendukung lainnya, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dukungan sumber daya aset ini mendorong pelaksanaan tugas berjalan dengan lebih mudah, cepat, dan efektif, sehingga berdampak positif pada pencapaian target organisasi. Selain itu, fasilitas kerja yang baik juga mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap loyalitas serta dedikasi dalam mendukung tujuan organisasi.

Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan atau produk yang dihasilkan. Hal ini sangat relevan bagi organisasi pelayanan publik, seperti DPPP, karena fasilitas yang baik memungkinkan proses operasional berlangsung lancar sekaligus mengurangi risiko gangguan. Selain itu, keberadaan alat dan teknologi yang tepat mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, DPPP diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jlh	Satuan	Keterangan
1	Sepeda Motor	71	Unit	38 Baik, 43 Rusak Berat
2	Speed Boat	4	Unit	Rusak Berat
3	Mesin Speed Boat	1	Unit	Rusak Berat
4	AC	12	Unit	7 Baik, 5 Rusak Berat
5	alat penghancur kertas	2	Unit	1 baik 1 rusak
6	Almari Arsip	10	Unit	Baik
7	TV LCD 32'	10	Unit	5 Baik, 5 Rusak Berat
8	Kulkas	1	Unit	Baik
9	Komputer PC	15	Unit	10 Baik, 5 Rusak Berat
10	Notebook	40	Unit	30 Baik, 10 Rusak Berat
11	Printer	82	Unit	33 Baik, 49 Rusak Berat
12	UPS/Stabilizer	8	Paket	Rusak Berat
13	Meja Kerja	12	Buah	Baik
14	Kursi Kerja	42	Buah	30 Baik, 12 Rusak Berat
15	Sofa	3	Set	Rusak Berat
16	Kamera	1	Paket	Baik
17	Sound System	4	Paket	3 Baik, 1 Rusak Berat
18	Genset dan Instalasi	2	Paket	Rusak Berat
19	Meja Pimping	1	Set	Baik
20	GPS	2	Unit	Baik
21	Filling Besi/Metal	20	Unit	5 Baik, 15 Rusak Berat
22	Papan Nama Instansi	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
23	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik

24	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Paket	Baik
25	Alat Pemotong Kertas (Perforator)	2	Unit	Rusak Berat
26	Meja Rapat	3	Unit	Baik
27	Meja Pelayanan	1	Unit	Baik
28	Kursi Rapat	15	Unit	15 Baik
29	Lemari Es	1	Unit	Baik
30	Harddisk	6	Unit	2 Baik, 4 Rusak Berat
31	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	Baik
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Unit	Rusak Berat
34	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	30	Unit	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	1 Baik
36	Kursi Kerja Pejabat Es. III	10	Unit	Baik
37	Kursi Kerja Pejabat Es. IV	30	Unit	Baik
38	Kursi Kerja Pejabat	30	Unit	Baik
39	Proyektor	2	Unit	2 Baik
40	Kursi Putar	10	Unit	5 Baik, 5 Rusak Berat
41	Meja Biro (I Biro)	20	Unit	5 Baik, 15 Rusak Berat
42	Meja Setengah Biro	10	Unit	2 Baik 8 Rusak Berat
43	Blower	4	Unit	Baik
44	Tabung Gas	1	Unit	Baik
45	Kompor Gas	1	Unit	Baik
46	Wireless Mic	3	Unit	Baik
47	Teralis	20	Unit	Baik
48	CCTV	8	Unit	Baik Rusak
49	Scanner	5	Unit	2 Baik, 3 Rusak Berat

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi penting terkait pengelolaan sektor perikanan, pertanian, dan pangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai bagian integral dalam struktur pemerintahan daerah, DPPP memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengelola, serta mengawasi urusan perikanan, pertanian, dan pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, DPPP melakukan berbagai proses, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan anggaran yang efektif dan efisien memungkinkan DPPP untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik.



Pengelolaan sumber daya yang ada juga dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai.

Kinerja pelayanan DPPP juga melibatkan pengawasan pelaksanaan program-program terkait perikanan, pertanian, dan pangan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Selain itu, DPPP juga melakukan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan akuntabilitas organisasi.

Dengan demikian, kinerja pelayanan DPPP yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPPP, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, DPPP perlu terus meningkatkan kinerja pelayanan dengan memperbaiki proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan akuntabilitas.

Dalam perspektif organisasi, kinerja pelayanan DPPP tidak hanya bergantung pada prosedur dan sistem yang digunakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, koordinasi internal antar unit, serta penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran proses administrasi keuangan. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas yang mengelola sektor perikanan dan pertanian, DPPP diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan yang responsif, akurat, dan transparan, serta dapat mengantisipasi dan menyelesaikan masalah terkait pengelolaan perikanan dan pertanian dengan cepat dan tepat. Kinerja pelayanan yang optimal akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan DPPP pada periode 2021-2024, yaitu:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase cakupan bina kelompok petani			-	6%	15%	25%	35%	45%	50%	6%	32%	76,56%	65,3%			100	100	100	100		
2	Persentase cakupan bina kelompok nelayan			-	6%	10%	25%	30%	35%	40%	39%	17%	13,6%	25,36%			100	100	54,4	72,5		
3	Persentase peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)			-	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	1%	14,96%	14,96%	1%			100	100	100	100		
4	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perkebunan (padi dan cengkeh)			-	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	1%	7,42%	1,2%	-15%			100	100	60	60		
5	Persentase peningkatan produksi peternakan (sapi dan unggas)			-	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	5%	7,99%	7,99%	1,92%	-2%			100	100	76,8	66		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Persentase peningkatan produksi olahan perikanan			-	10%	12%	15%	17%	20%	25%	10%	92%	9,3%	-70%			100	100	62	41		
7	Score Pola Pangan Harapan			-	80	80,5	81	81,5	82	82,3	77,2	73,4	78,7	80,73			96,5	91,2	97,2	99		
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	CC/ 56,8	CC/ 57	CC/ 57,2	CC/ 57,4	CC/ 57,6	CC/ 57,7	64,36	77,35	77,41	78			100	100	100	100		
9	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah			-	B/ 69	B/ 69,5	B/ 70	B/ 70,5	B/ 71	B/ 71,5	94,78	95,14	95,8	95,8			100	100	100	100		

Berdasarkan data capaian kinerja, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) menunjukkan tren positif dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja DPPP yang tercantum di atas menunjukkan berbagai target yang harus dicapai dalam periode perencanaan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai aspek seperti pertanian dan perikanan.

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja DPPP adalah nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Nilai AKIP direncanakan untuk meningkat setiap tahunnya, dan realisasinya juga menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Hal ini mencerminkan komitmen DPPP untuk memperbaiki sistem birokrasi guna mencapai kinerja yang lebih efisien dan efektif.

Peningkatan nilai AKIP menunjukkan bahwa DPPP memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memperbaiki sistem birokrasi, DPPP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tren positif dalam capaian kinerja DPPP memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas: Peningkatan nilai AKIP menunjukkan bahwa DPPP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Dengan memperbaiki sistem birokrasi, DPPP dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Peningkatan kinerja DPPP dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dengan demikian, DPPP perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, serta terus memperbaiki sistem birokrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPP, yaitu:

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 14.9	Rp 12.9	Rp 14.5	Rp 13.7	Rp 12.3	Rp 13.4	Rp 12.0	Rp 11.7	Rp 12.2	Rp 12.3	Rp -	Rp -	80,6	90,7	84,3	89,8	0	0	Rp14.054.126.048	12.026.925.784
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 11.6	Rp 1.22	Rp 11.7	Rp 4.17	Rp 5.02	Rp 1.05	Rp 4.77	Rp 1.20	Rp 8.56	Rp 3.83	Rp -	Rp -	41,1	98,4	73,0	91,9	0	0	Rp9.464.874.184	3.837.103.216
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 1.79	Rp 231.	Rp 2.98	Rp 1.19	Rp 1.57	Rp 1.35	Rp 786.	Rp 217.	Rp 2.49	Rp 1.08	Rp -	Rp -	43,9	94,2	83,7	90,8	0	0	Rp1.570.000.000	1.085.920.784

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 40.000	Rp 112.123.000	Rp 305.199.800	Rp 104.643.300	Rp 232.400.000	Rp 557.000.000	Rp 14.495.000	Rp 38.673.000	Rp 100.329.092	Rp 95.576.800	Rp -	Rp -	36,2	34,5	32,9	91,3	0	0	Rp232.400.000	62.268.473
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 965.665.000	Rp 232.986.600	Rp 533.238.118	Rp 24.773.200	Rp 551.358.914	Rp 216.000.000	Rp 439.103.300	Rp 213.206.600	Rp 343.464.060	Rp 21.864.500	Rp -	Rp -	45,5	91,5	64,4	88,3	0	0	Rp551.358.914	254.409.615
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 1.666.994	Rp 131.477.768	Rp 1.739.435.615	Rp 100.000.000	Rp 435.000.000	Rp 10.000.000	Rp 1.426.520	Rp 123.300	Rp 1.173.000	Rp 83.47.992	Rp -	Rp -	85,6	93,9	67,5	83,4	0	0	Rp435.000.000	701.659.748

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 355.048.200	Rp 222.963.330	Rp 505.780.345	Rp 25.000.000	Rp 230.000.000	Rp 15.000.000	Rp 314.770.520	Rp 141.721.730	Rp 209.133.018	Rp 20.699.000	Rp -	Rp -	88,7	63,6	41,3	82,8	0	0	Rp230.000.000	171.581.067
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	Rp5.166.667	0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 8.770.000	Rp 92.366	Rp 1.684.792	Rp 34.500.000	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000	Rp 6.980	Rp 78.900	Rp 1.377.406.531	Rp 28.993.500	Rp -	Rp -	79,7	85,5	81,8	84,0	0	0	Rp307.568.186	373.075.883



Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Ratio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 483.432.	Rp 650.806.	Rp 178.215.	Rp 124.324.	Rp 80.265.7	Rp 411.000.	Rp 453.098.	Rp 589.884.	Rp 141.305.	Rp 120.193.	Rp -	Rp -	93,7	90,6	79,3	96,7	0	0	Rp321.340.641	326.120.616
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 137.590.000	Rp -	Rp 141.748.000	Rp 77.876.00	Rp 113.567.931	Rp 134.000.	Rp 5.144.40	Rp -	Rp 3.663.945	Rp 70.242.994	Rp -	Rp -	3,7	0,0	2,6	90,2	0	0	Rp113.567.931	26.350.446
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp -	Rp 20.362.890	Rp -	Rp 20.043.000	Rp 14.559.900	Rp 12.000.00	Rp -	Rp 18.780.00	Rp -	Rp 19.288.00	Rp -	Rp -	0	92,2	0,0	96,2	0	0	Rp16.741.448	19.034.000



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan di DPPP adalah nelayan, pembudidaya perikanan, pengusaha perikanan, lembaga terkait (seperti pemerintah, universitas, LSM), dan masyarakat umum yang tertarik dengan informasi dan layanan terkait perikanan dan pertanian, pelaku usaha produk olahan perikanan, petani, pekebun, dan peternak.

Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan menyediakan layanan seperti pelatihan, bantuan modal, infrastruktur penangkapan, dan akses informasi pasar kepada nelayan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepada pembudidaya ikan diberikan dukungan teknis berupa bantuan benih, pupuk, pakan, dan informasi tentang teknik budidaya yang baik. Sedangkan kepada pengusaha perikanan, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan membantu pengusaha dalam hal perizinan, regulasi, pemasaran, dan akses ke pasar. Kepala lembaga terkait lainnya, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, universitas, LSM, dan organisasi lainnya untuk penelitian, pengembangan, dan penyuluhan terkait perikanan.

Masyarakat umum lainnya juga menjadi salah satu kelompok sasaran di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dengan menyediakan informasi tentang keamanan pangan, kesehatan hasil perikanan, dan promosi perikanan kepada masyarakat umum. Dalam hal Pertanian, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan memberikan layanan langsung kepada petani, mulai dari penyuluhan tentang teknik budidaya tanaman, pengolahan lahan, hingga pemasaran hasil panen.

Selain itu, dukungan kepada kelompok tani, seperti pembinaan kelembagaan, pelatihan, dan akses terhadap bantuan modal dan teknologi. Selain petani dan kelompok tani, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan juga memberikan layanan kepada masyarakat yang terlibat dalam sektor pertanian, seperti pengusaha agrobisnis, lembaga pendidikan, dan penelitian.

2.5. Permasalahan dan isu strategis

Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas mencakup berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya infrastruktur pendukung, baik dalam hal transportasi maupun fasilitas pengolahan hasil perikanan dan pertanian, yang menyebabkan

ketidakmerataan distribusi produk dan lambatnya proses distribusi informasi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan pangan serta rendahnya daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perikanan dan pertanian turut memperburuk kinerja sektor ini, yang memerlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi petani dan nelayan.

Isu strategis lainnya adalah pengaruh perubahan iklim yang semakin nyata, yang berpotensi merusak ekosistem perikanan dan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Perubahan pola cuaca yang ekstrem, seperti cuaca buruk dan musim kemarau yang tidak menentu, mengancam keberlanjutan produksi pangan dan hasil laut. DPPP dihadapkan pada kebutuhan untuk merancang strategi mitigasi yang adaptif dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor vital ini. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan serta rendahnya penerapan teknologi dalam produksi pertanian dan perikanan menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Lebih lanjut, masih rendahnya tingkat akses masyarakat terhadap teknologi modern dan informasi yang dapat mendukung peningkatan hasil perikanan dan pertanian menjadi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing daerah. Pemanfaatan teknologi yang masih terbatas dan rendahnya tingkat digitalisasi dalam sektor perikanan dan pertanian menghambat kemajuan dalam hal efisiensi produksi dan pemasaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan akses terhadap teknologi, serta penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi langkah strategis yang perlu dilaksanakan untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DPPP) Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh DPPP dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor perikanan, pertanian, dan pangan yang berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan perikanan dan pertanian, terutama dalam hal pengawasan dan

pemanfaatan potensi daerah yang belum optimal. Dalam hal ini, pengawasan terhadap kegiatan perikanan dan pertanian yang tidak ramah lingkungan dan berkelanjutan yang belum efektif, yang dapat mengancam kelestarian ekosistem serta keberlanjutan produksi pangan dan hasil laut.

Selain itu, dalam melaksanakan fungsi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan dan pertanian, DPPP menghadapi tantangan berupa rendahnya kualitas dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) di bidang ini. Banyak petani dan nelayan yang masih mengandalkan metode tradisional dalam pengelolaan produksi, sehingga produktivitasnya cenderung rendah dan daya saing produk lokal terbatas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses pelatihan, pembinaan, serta penyuluhan yang berbasis teknologi dan inovasi, sehingga diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam sektor-sektor tersebut.

Masalah keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas transportasi, pengolahan hasil perikanan dan pertanian, serta jaringan distribusi yang belum optimal, menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi distribusi hasil produksi dan pelayanan kepada masyarakat. Minimnya sarana dan prasarana ini berdampak pada ketidakmerataan distribusi pangan dan produk perikanan, yang mempengaruhi kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, DPPP perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan pertanian, serta memperlancar jalur distribusi barang dan informasi.

b. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dicarikan solusinya. Manakala hal tersebut tidak terpecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Hal yang menjadi dasar ditetapkannya isu strategis dan menjadi fokus perhatian bagi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pengembangan potensi dan kondisi sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat. di bawah ini akan dikemukakan berbagai isu strategis terkait dengan pembangunan sektor Perikanan dan Pertanian di Kepulauan Anambas sebagai berikut:



Tabel 2.7 Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	Perlindungan terhadap laut	Penurunan tingkat kemiskinan	Penurunan jumlah sampah di laut	Peningkatan kontribusi PDRB sektor perikanan terhadap PDRB daerah dan nasional
Jumlah Pembudidaya Ikan	Kurangnya sarana dan prasarana perikanan budidaya	Pemberdayaan masyarakat				
Olahan produk perikanan	Sulitnya akses pemasaran	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri kecil	Pengembangan produk perikanan di skala retail modern	Memperkuat dan mengembangkan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi	Peningkatan nilai produk perikanan	Peningkatan daya saing dan mutu produk perikanan
Pertanian tanaman pangan dan perkebunan	Kurangnya sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan perkebunan	potensi pengembangan pertanian pangan seluas 1,203 Ha pada ruang kawasan tanaman pangan	Pemenuhan kebutuhan lahan pertanian	Peningkatan produktivitas lahan pertanian	Pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal	Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi



POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGI S PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Peternakan hewan ruminansia dan unggas	Kurangnya sarana dan prasarana peternakan	Meningkatkan pertanian berkelanjutan		Peningkatan produksi daging dan susu sapi		Peningkatan ketersediaan lapangan kerja sektor Pertanian;
Pengelolaan ketahanan pangan	Rendahnya indeks ketahanan pangan	Kapasitas daya dukung penyedia pangan tergolong tingkat sedang dengan persentase 51.06%	Penurunan krisis pangan global	Penguatan kemandirian pangan	Diversifikasi sumber pangan lokal	Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi di Kabupaten Kepulauan Anambas

Dokumen KLHS merupakan acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan hidup serta berkelanjutan. Berikut ini adalah daya dukung dan daya tampung sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta keseimbangan antara keduanya sektor perikanan, pertanian dan pangan:

1. Kapasitas daya dukung penyedia pangan Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong tingkat sedang dengan persentase 51.06%. Kecamatan yang terindikasi tinggi daya dukung penyedia pangannya seperti Kecamatan Jemaja, Palmatak dan Siantan Timur. Dengan kapasitas daya dukung penyedia pangan yang dominan kategori rendah-sangat rendah berpotensi mengalami kerusakan jika tidak dikelola dengan pemberian input produksi yang tidak berimbang. Misalkan pemberian pupuk atau pengendalian hama dan penyakit atau pengelolaan lahan yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air. Sebagian besar lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki potensi rendah hingga sangat rendah dalam daya dukung penyedia pangan terletak di ekoregion Lembah antar Perbukitan/Pegunungan Denudasional dan Lerengkaki Perbukitan/Pegunungan Denudasional. Lahan yang berpotensi rendah dalam penyedia pangan tersebar pada hamparan lahan yang



berkemiringan curam dan berbahan induk batuan granit yang banyak terdapat di Kepulauan Anambas.

2. Berdasarkan analisis *overlay* peta daya dukung penyedia pangan, tutupan lahan eksisting yang telah diverifikasi dan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas, maka terdapat potensi untuk pengembangan pertanian pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas seluas 1,203 ha dengan kelas kategori tinggi hingga sedang untuk daya dukung penyedia pangan yang tersebar pada jenis tutupan lahan kebun, tegalan dan semak pada kawasan tanaman pangan. Jika melihat angka hasil proyeksi penambahan luas lahan pertanian tanaman pangan hingga tahun 2029 (berjalan apa adanya) maka luas areal pertanian pangannya menjadi 1.220.60 Ha, sementara potensi pengembangan pertanian pangan ada seluas 1,203 Ha pada ruang kawasan tanaman pangan, sehingga dengan potensi ketersediaan lahan seluas 1,203 Ha dinilai sudah cukup.

Di sektor perikanan, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu mempertimbangkan kapasitas perairan, kualitas air, dan dampak kegiatan perikanan terhadap lingkungan hidup. Sementara itu, di sektor pertanian, kajian ini perlu mempertimbangkan kapasitas lahan, kualitas tanah, dan dampak kegiatan pertanian terhadap lingkungan hidup. Di sektor pangan, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu mempertimbangkan ketersediaan pangan, kualitas pangan, dan dampak kegiatan pangan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini juga terkait dengan beberapa isu strategis, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sementara ketahanan pangan merupakan isu strategis yang terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup dan berkualitas.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga merupakan isu strategis yang terkait dengan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Pembangunan berkelanjutan merupakan isu strategis yang terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup. Dengan demikian, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di sektor perikanan, pertanian, dan pangan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dapat digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa visi dan misi perangkat daerah mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih, seperti diulas sebelumnya bahwa Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2025 - 2029 adalah Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang tercantum pada misi 3 yaitu Mewujudkan Pelayanan yang Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif, dan Misi 4 Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata yang dapat kami jabarkan sebagai berikut:

1. Melalui pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel. Peningkatan sumberdaya manusia yang dalam hal ini adalah pegawai yang dapat memberikan pelayanan prima melalui pelaksanaan reformasi birokrasi; dan untuk mencegah dan atau meminimalisir tindak korupsi dilakukan dengan mengelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, dan nilai survei kepuasan masyarakat yang baik.
2. Pengembangan sektor perikanan, pertanian dan ketahanan pangan dilaksanakan melalui pemberdayaan nelayan dan petani serta peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil.

penjabaran misi tersebut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan perikanan, pertanian dan pangan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,64	4,91	5,19	5,46	5,74	6,01		
			Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	106	106,9	107,7	108,4	108,7	109	
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah		Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1,69	1,70	1,71	1,72	1,73	1,74		
			Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	100	100,7	101	101,3	101,4	101,6	
			Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	55,4	55,51	55,65	55,72	55,83	55,91	
Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	78,1	78,4	78,7	79	79,5	79,8	



Target pada tujuan dan sasaran di atas sudah sesuai dengan asas rasionalitas dengan mempertimbangkan capaian lima tahun sebelumnya. DPPP memiliki tiga urusan yang berbeda yaitu perikanan, pertanian dan pangan sehingga dalam penyusunan tujuan dan sasaran terdapat 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang didalamnya sudah mencakup tupoksi di 5 bidang dan 1 sekretariat.

Tujuan dan sasaran di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan sudah selaras dengan NSPK (Tupoksi urusan sesuai kewenangan daerah) yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka dibutuhkan strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah yang dituangkan dalam penahapan renstra. Untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dalam lingkungan yang dinamis saat ini maka dibutuhkan prioritas pembangunan yang disusun dalam jangka waktu lima tahunan. Berikut ini adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan pelayanan publik yang prima	Peningkatan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan Sekretariat Dinas	Evaluasi awal terhadap pelaksanaan rencana strategis.	Penyesuaian terhadap rencana strategis berdasarkan hasil evaluasi	Penguatan koordinasi dengan unit-unit lain di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan	Peningkatan usaha pengolahan ikan	Peningkatan sektor perikanan termasuk kapal dan sarana produksi perikanan lainnya	Analisis Rencana Pengembangan Perikanan dan Pertanian	Pemantapan kapasitas nelayan, Pembudidaya, pengolah ikan dan petani

yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan				
Peningkatan kapasitas penyuluh dalam menguatkan sistem penyuluhan pertanian	Mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan memiliki posisi tawar serta jaringan yang luas	Peningkatan produksi pertanian	Penetapan LP2B	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
Penyediaan sarana dan prasarana bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian	Penyediaan bibit dan benih varietas unggul, berikut penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Koordinasi dengan stakeholders terkait ketahanan pangan	Pengembangan sentra produksi pangan	Pemantapan inovasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan
Pemutakhiran jumlah nelayan, petani, dan calon penerima bantuan lainnya	Pengembangan aktivitas perikanan budidaya	Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap dan budidaya secara terintegrasi	Hilirisasi Perikanan (Industrialisasi)	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah
Percobaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Konsolidasi penyelenggaraan TPI	Pemantapan penyelenggaraan TPI	Peningkatan integrasi infrastruktur sektor perikanan	Optimalisasi perikanan dan kelautan



Pada tahap pertama, fokus pada penguatan pelayanan publik yang prima dan peningkatan sistem manajemen dan teknologi informasi. Prioritas utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Sekretariat Dinas. keberhasilan diukur dengan melihat peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam kegiatan Sekretariat Dinas. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kegiatan di tahap berikutnya.

Pada tahap kedua, fokus pada peningkatan usaha pengolahan ikan dan peningkatan sektor perikanan. Prioritas utama adalah meningkatkan produksi dan kualitas ikan olahan serta meningkatkan pendapatan nelayan dan pengusaha perikanan. keberhasilan diukur dengan melihat peningkatan produksi ikan olahan dan peningkatan pendapatan nelayan dan pengusaha perikanan. Hasil dari tahap ini akan menjadi input untuk pengembangan ekonomi biru dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di tahap berikutnya.

Pada tahap ketiga, akan dilakukan evaluasi awal terhadap pelaksanaan rencana strategis dan penyesuaian terhadap rencana strategis. Prioritas utama adalah mengevaluasi keberhasilan rencana strategis dan menyesuaikan rencana strategis berdasarkan hasil evaluasi. keberhasilan diukur dengan melihat laporan evaluasi rencana strategis yang komprehensif dan penyesuaian rencana strategis yang tepat. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas rencana strategis di tahap berikutnya.

Pada tahap keempat, fokus pada penguatan koordinasi dengan unit-unit lain di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan peningkatan produksi pertanian. Prioritas utama adalah meningkatkan koordinasi dengan unit-unit lain dan meningkatkan produksi pertanian. keberhasilan diukur dengan melihat peningkatan koordinasi dengan unit-unit lain dan peningkatan produksi pertanian. Hasil dari tahap ini akan menjadi input untuk pengembangan sentra produksi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan di tahap berikutnya.

Pada tahap kelima, fokus pada pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah dan optimalisasi perikanan dan kelautan. Prioritas utama adalah mengembangkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah dan mengoptimalkan perikanan dan kelautan. keberhasilan diukur dengan melihat peningkatan pendapatan daerah dari sektor perikanan dan kelautan serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Hasil dari tahap ini akan menjadi hasil akhir dari rencana strategis dan akan menjadi dasar untuk evaluasi keberhasilan rencana strategis

Tabel. 3.3 Arah dan Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	2	3	4	5
1	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Thn 2024, Permendagri Nomor 18 Thn 2020	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah dan cepat	Implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam seluruh aktivitas organisasi.	
			Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.	
			Pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan.	
2		Mengembangkan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung sektor ekonomi bidang pertanian dan perikanan dengan pendekatan teknologi modern hingga hilirisasi produk unggulan	Mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan memiliki posisi tawar serta jaringan yang luas	
			Memperkuat kelembagaan penyuluhan terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten	
			Pelatihan manajerial kelompok, pendampingan bagi Poklahsar, KUB dan Pokdakan yang tertib administrasi dan berbadan hukum.	
			Menyelenggarakan pelatihan, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya melalui materi kelas dan paktek lapangan	
			Pengadaan barang berupa armada perikanan tangkap, serta alat penangkapan ikan yang memiliki kapasitas lebih tinggi, berbahan bakar yang hemat, dan memiliki kemudahan dalam penggunaanya	
			Peningkatan kualitas input produksi, yaitu benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya;	
			Melakukan revitalisasi pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi	

		<p>yang tepat sebagai pendukung dalam mengembangkan penanganan hasil perikanan</p> <p>Pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat</p> <p>Penyempurnaan regulasi lahan dan Membangun kawasan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan</p> <p>Menyediakan dan menyalurkan benih unggul dan fasilitasi pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima</p> <p>Melakukan pemanfaatan pekarangan untuk sumber pangan keluarga</p>	
		<p>Melengkapi data neraca pangan online dan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi) dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian</p> <p>Melakukan koordinasi dengan Perum Bulog untuk pengadaan dan penyimpanan CPPD</p> <p>Koordinasi dengan Disperindagkop terkait stok bahan pokok</p> <p>Melaksanakan survei panel harga pangan</p> <p>Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pangan/ diversifikasi pangan</p>	

Dengan strategi dan arah kebijakan yang dirancang secara terfokus, DPPP memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan pendekatan yang sistematis dan efektif. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan pembangunan perikanan, pertanian dan pangan akan dilaksanakan melalui peningkatan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan, peningkatan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan, peningkatan produksi pertanian / perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian dan peningkatan ketahanan pangan.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah, dan cepat, pemerintah daerah akan melakukan implementasi standar operasional prosedur (SOP) dalam seluruh aktivitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan lain, seperti meningkatkan kualitas input produksi pertanian dan perikanan, serta mengembangkan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat. Prioritas dari arah kebijakan ini adalah tinggi, dan indikator keberhasilannya adalah peningkatan indeks kepuasan masyarakat dan efisiensi waktu dan biaya. Stakeholder yang terlibat dalam arah kebijakan ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung sektor ekonomi bidang pertanian dan perikanan, pemerintah daerah akan melakukan beberapa kegiatan, seperti mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan memiliki posisi tawar serta jaringan yang luas, memperkuat kelembagaan penyuluhan terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, serta melakukan pelatihan manajerial kelompok dan pendampingan bagi Poklahsar, KUB, dan Pokdakan yang tertib administrasi dan berbadan hukum. Arah kebijakan ini memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan lain, seperti meningkatkan kualitas input produksi pertanian dan perikanan, serta mengembangkan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat. Prioritas dari arah kebijakan ini adalah tinggi, dan indikator keberhasilannya adalah peningkatan produksi pertanian dan perikanan, serta peningkatan pendapatan petani dan nelayan. Stakeholder yang terlibat dalam arah kebijakan ini adalah pemerintah daerah, petani, dan nelayan

Untuk meningkatkan kualitas input produksi pertanian dan perikanan, pemerintah daerah akan melakukan beberapa kegiatan, seperti peningkatan kualitas benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya. Arah kebijakan ini memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan lain, seperti mengembangkan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung sektor ekonomi bidang pertanian dan perikanan, serta mengembangkan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat. Prioritas dari arah kebijakan ini adalah sedang, dan indikator keberhasilannya adalah peningkatan produksi pertanian dan perikanan, serta peningkatan kualitas produk. Stakeholder yang terlibat dalam arah kebijakan ini adalah pemerintah daerah, petani, dan nelayan.

Diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, pemerintah daerah akan melakukan beberapa kegiatan, seperti pengembangan diversifikasi produk olahan dan penyempurnaan regulasi lahan. Arah kebijakan ini memiliki keterkaitan



dengan arah kebijakan lain, seperti mengembangkan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung sektor ekonomi bidang pertanian dan perikanan, serta meningkatkan kualitas input produksi pertanian dan perikanan. Prioritas dari arah kebijakan ini adalah sedang, dan indikator keberhasilannya adalah peningkatan nilai tambah produk olahan dan peningkatan pendapatan petani dan nelayan. Stakeholder yang terlibat dalam arah kebijakan ini adalah pemerintah daerah, petani, dan nelayan.

Peningkatan ketersediaan dan kemudahan distribusi pangan, pemerintah daerah akan melakukan beberapa kegiatan, seperti melengkapi data neraca pangan online dan koordinasi dengan BULOG KKA untuk pengadaan dan penyimpanan CPPD. Arah kebijakan ini memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan lain, seperti mengembangkan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung sektor ekonomi bidang pertanian dan perikanan. Prioritas dari arah kebijakan ini adalah tinggi, dan indikator keberhasilannya adalah peningkatan ketersediaan pangan dan penurunan harga pangan. Stakeholder yang terlibat dalam arah kebijakan ini adalah pemerintah daerah dan Perum Bulog.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sektor Perikanan, Pertanian dan Pangan merupakan sektor potensial untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan sektor Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, apabila dilakukan secara benar, maka secara signifikan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping tetap mampu menjadi bagian dalam pengendalian kualitas lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam paradigma pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Perikanan, Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 - 2029, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tahun 2030 dimasukkan dalam perencanaan dikarenakan tahun 2030 merupakan masa transisi. Sehingga perencanaan Tahun 2030 dapat digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat itu.

Tujuan dan sasaran misi yang menjadi dasar pengembangan dan pembangunan Perikanan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah pada misi kedua dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 – 2029. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan daftar program prioritas dikaitkan dengan sub kegiatan yang berhubungan dapat menjawab program tersebut.



Tabel. 4.1

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	KET
1	2	3	4	5
1	Tangkap Olah Jual (TOJ) dan Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengembangan Nelayan Kecil	Kapasitas
			Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Nelayan Kecil	Fasilitasi Kelembagaan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
2	Hilirisasi Perikanan (Industrialisasi)	Percentase Produksi Pengolahan Perikanan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Keterkaitan Program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja per Unit Kerja Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Anambas secara berturut – turut tertuang dalam tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026			2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program Penyuluhan Pertanian	Percentase SDM Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian dalam satu tahun/ target penyuluhan pertanian (target 250) *100%	50	75	77	100.000.000	78	192.920.000	80	294.020.000	90	345.230.000	100	346.561.000			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	336	240	200	100.000.000	300	192.920.000	350	294.020.000	350	345.230.000	400	346.561.000			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	0	-	0	3	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	61	0	5	100.000.000	5	11.000.000	5	12.100.000	5	13.310.000	5	14.641.000			
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana kendaraan roda dua penyuluhan pertanian	15	0	-	0	5	50.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	5	5	-	0	7	31.920.000	7	31.920.000	7	31.920.000	7	31.920.000			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Percentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas peternakan	Jumlah Penyediaan sarana pertanian/ target penyediaan sarana*100%	80	81	85	1.200.000.000	87	945.750.000	90	681.040.903	95	776.670.000	100	916.670.000			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	1	0	-	0	-	0	-	0	1	150.000.000	1	150.000.000			
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih Bersertifikat perkebunan berbentuk batang	Jumlah Benih Bersertifikat perkebunan berbentuk batang	0	0	-	0	-	0	-	0	50	150.000.000	100	150.000.000			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	500.000.000	1	225.750.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah dokumen peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	3	3	500.000.000	3	225.750.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terawasinya Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Jumlah dokumen pengawasan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	1	0	-	0	1	120.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000			
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	0	-	0	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000			
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah laporan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	0	0	-	0	1	60.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000			
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah dokumen penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah dokumen penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1	1	1	700.000.000	1	600.000.000	1	321.040.903	1	266.670.000	1	366.670.000			
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Rumput/ Legum)	0	0	0,1	100.000.000	2	200.000.000	0,5	66.670.000	0,5	66.670.000	0,5	66.670.000			
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten /kota lain (sapi, ayam, itik tergantung kebutuhan dan anggaran yang tersedia)	100,0	0,0	750 ayam dan 10 sapi	600.000.000	600 ayam dan 10 sapi	400.000.000	300 itik dan 5 sapi	254.370.903	300 itik dan 5 sapi	200.000.000	300 itik dan 5 sapi	300.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Percentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah prasarana yang tersedia/ target prasarana yang tersedia (10)*100%	87	88,2	88,25	400.000.000	89	900.000.000	92	1.600.000.000	95	1.350.000.000	100	1.100.000.000			
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	1	0	1	300.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Jumlah luas kawasan pertanian yang termanfaatkan dalam Ha	-	0	-	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000			
Penetapan Kawasan lahan dan lahan cadangan pangan berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten / Kota	Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan	Jumlah dokumen yang berhasil disusun	-	0	-	0	-	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan, Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kab/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B yang berhasil dibuat dan dicetak	1	0	1	300.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000			
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang tersedia (puskeswan+prasarana pertanian lainnya)	1	0	1	100.000.000	3	750.000.000	4	1.400.000.000	3	1.150.000.000	4	900.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah pengadaan prasarana yang terealisasi (alat/mesin pemotong rumput/ hand sprayer/hand tractor/ cultivator)	1	0	1	100.000.000	1	50.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah Puskeswan yang dibangun (target 1), direhabilitasi dan dipelihara (target 1) serta beroperasi (target 2)	1	0	-	0	2	500.000.000	2	700.000.000	2	450.000.000	2	200.000.000			
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Jumlah RPH yang dibangun, dipelihara serta beroperasi (target 1)	0	0	-	0	1	200.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000			
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Jumlah kegiatan pengendalian penanggulangan bencana pertanian/ target pengendalian penanggulangan bencana pertanian (target 1 kali)*100%	0	75	77	100.000.000	80	150.000.000	85	250.000.000	95	250.000.000	100	250.000.000			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan	Jumlah penanganan kasus penyakit pertanian yang berhasil dikendalikan	1	0	1,00	100.000.000	1	150.000.000	1,00	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000			
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	0,0	0,0	0,1	100.000.000	0,7	150.000.000	1,0	150.000.000	1,0	150.000.000	1,00	150.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,0	0,0	-	0	-	0	0,5	100.000.000	0,7	100.000.000	0,7	100.000.000			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Jumlah hewan yang diberi perlakuan/ target hewan yang diberi perlakuan (4000 unggas, 1500 ruminansia, 1500 hewan kesayangan)*100%	70,17	86,0	90,0	350.000.000	92,0	710.000.000	94,0	760.000.000	96,0	680.000.000	100,0	740.000.000			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,0	0,0	1,0	200.000.000	1,0	50.000.000	1,0	80.000.000	1,0	100.000.000	1,0	50.000.000			
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,0	0,0	1,0	200.000.000	1,0	50.000.000	1,0	80.000.000	1,0	100.000.000	1,0	50.000.000			
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM dan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM dan pengawasan peredaran produk hewan	1,0	0,0	-	0	1,0	130.000.000	1,0	130.000.000	1,0	130.000.000	3,0	140.000.000			
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah surat rekommendasi, SKKH, NKV sebagai persyaratan teknis keluar masuk hewan / produk hewan	1,0	0,0	-	0	1,0	70.000.000	1,0	70.000.000	1,0	60.000.000	3,0	60.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan di pelabuhan (daging sapi beku dan daging ayam beku, frozen food)	0,0	0,0	-	0	1,0	60.000.000	1,0	60.000.000	1,0	70.000.000	3,0	80.000.000			
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah	1,0	1,0	1,00	150.000.000	1,0	150.000.000	1,0	250.000.000	1,0	250.000.000	1,0	300.000.000			
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium	0,0	0,0	-	0	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000			
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner	12,0	6,0	12,0	150.000.000	12,0	100.000.000	12,00	200.000.000	12,0	200.000.000	12,0	250.000.000			
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dan Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah pelaksanaan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (dalam 1 tahun)	0,0	0,0	-	0	12,0	380.000.000	12,00	300.000.000	12,0	200.000.000	36,0	250.000.000			
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	0,0	0,0	-	0	1,0	80.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	0,0	0,0	-	0	20,0	300.000.000	10,0	200.000.000	10,0	100.000.000	6,0	150.000.000			
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Percentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	(Energi konsumsi pangan/angka kecukupan energi konsumsi(AKE 2100)*100%	96,5	96,7	96,90	670.800.000	97,1	630.000.000	97,3	680.000.000	97,5	680.000.000	97,5	623.000.000			
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	9,04	8,75	8,74	8,73	8,72	8,72	8,71	8,71	8,70	8,70					
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Jumlah kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	3,0	0,0	2,0	270.800.000	2,0	430.000.000	2,0	480.000.000	2,0	480.000.000	2,0	480.000.000			
Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat produsen dan konsumen di kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/kota	Jumlah Laporan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di kabupaten dalam satu tahun	3,0	0,0	2,0	270.800.000	2,0	270.000.000	2,0	270.000.000	2,0	270.000.000	2,0	270.000.000			
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	0,0	0,0	-	0	10,0	110.000.000	10,0	110.000.000	10,0	110.000.000	10,0	110.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	0,0	0,0	-	0	-	0	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000			
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah dokumen terkait informasi NBM	2,0	0,0	-	0	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000			
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan koordinasi terkait pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	1,0	0,0	1,0	200.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000			
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan Kabupaten/ kota	12,5	0,0	5,0	200.000.000	5,0	100.000.000	5,0	100.000.000	5,0	100.000.000	5,0	100.000.000			
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Data Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	Jumlah dokumen target konsumsi pangan perkapita pertahun	1,0	1,0	1,0	200.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	43.000.000			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1,0	1,0	1,0	200.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	43.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Percentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang Ditangani	Jumlah Desa atau Kelurahan yang mendapatkan interfensi Penanganan Kerawanan Pangan/ Jumlah Desa atau kelurahan *100%	17,0	19,0	22,0	250.000.000	37,0	170.000.000	46,0	170.000.000	56,0	170.000.000	66,0	170.000.000			
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0,0	0,0	1,0	150.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000			
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Jumlah dokumen peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutahirkan	0,0	0,0	1,0	150.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000			
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan desa kelurahan	Jumlah Kegiatan penanganan kerawanan pangan desa kelurahan	0,0	0,0	1,0	100.000.000	1,0	140.000.000	1,0	140.000.000	1,0	140.000.000	1,0	140.000.000			
Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencangkup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencangkup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pangadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencangkup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,0	1,0	1,0	100.000.000	1,0	90.000.000	1,0	90.000.000	1,0	90.000.000	1,0	90.000.000			
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	2,0	0,0	-	0	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Percentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan Mutu Keamanan Pangan	Jumlah Pengawasan Kemanan Pangan Segar asal Tumbuhan Yang di uji / Target Pengawasan Pangan Segar asal Tumbuhan *100% (Target: 2 kali)	100,0	100,0	100,0	100.000.000	100,0	125.000.000	100,0	135.000.000	100,0	135.000.000	100,0	135.000.000			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	2,0	2,0	2,0	100.000.000	3,0	125.000.000	3,0	135.000.000	3,0	135.000.000	13,0	135.000.000			
Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen terkait sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten	1,0	1,0	1,0	100.000.000	1,0	30.000.000	1,0	40.000.000	1,0	40.000.000	1,0	40.000.000			
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0,0	0,0	0,0	0	1,0	45.000.000	1,0	45.000.000	1,0	45.000.000	3,0	45.000.000			
Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	0,0	0,0	-	0	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	3,0	50.000.000			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 / Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n-1 *100%	27.227,35	27.499,62	27.499,97	1.000.000.000	27.774,26	573.992.182	28.052,01	450.000.000	28.332,53	440.000.000	28.615,85	481.178.273			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberian pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten	Jumlah Nelayan Kecil yang diberikan pemberdayaan dalam daerah kabupaten/kota	400,0	0,0	50,0	300.000.000	50,0	210.000.000	50,0	210.000.000	50,0	210.000.000	50,0	210.000.000	210.000.000		
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	50,0	0,0	20,0	150.000.000	20,0	70.000.000	20,0	70.000.000	20,0	70.000.000	20,0	70.000.000	70.000.000		
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	205,0	40,0	10,0	150.000.000	10,0	70.000.000	10,0	70.000.000	10,0	70.000.000	20,0	70.000.000	70.000.000		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah unit sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil yang tersedia	148,0	0,0	-	0	10,0	70.000.000	10,0	70.000.000	10,0	70.000.000	10,0	70.000.000	70.000.000		
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Peserta lelang yang terdaftar	Jumlah orang/ peserta lelang yang terdaftar	0,0	0,0	10,0	700.000.000	10,0	363.992.182	10,0	240.000.000	10,0	230.000.000	10,0	271.178.273			
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen terkait SOP pengelolaan dan penyelenggaraan TPI	1,0	0,0	1,0	100.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000	1,0	30.000.000	30.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) selama 1 tahun	0,0	0,0	3,0	600.000.000	18,0	333.992.182	21,0	210.000.000	27,0	200.000.000	36,0	241.178.273			
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun n-1 /Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun n-1 *100%	179,0	43,0	188,0	2.005.000.000	197,0	2.905.000.000	207,0	2.500.000.000	218,0	2.929.081.526	239,0	3.000.000.000			
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah dokumen pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah dokumen pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	1,0	1,0	1,0	100.000.000	1,0	500.000.000	1,0	400.000.000	1,0	500.000.000	1,0	400.000.000			
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Pokdakan yang sudah ada/sudah dibentuk kemudian dilakukan pembinaan dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan Pokdakan dan peningkatan kelas kelompok	83,0	30,0	-	0	5,0	250.000.000	5,0	250.000.000	5,0	300.000.000	5,0	200.000.000			
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang baru dibentuk atau masih dalam tahap pengembangan	83,0	0,0	5,0	100.000.000	5,0	250.000.000	5,0	150.000.000	5,0	200.000.000	5,0	200.000.000			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1,0	0,0	1,0	1.905.000.000	1,0	2.405.000.000	1,0	2.100.000.000	1,0	2.429.081.526	1,0	2.600.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan informasi perikanan budidaya yang dirilis setiap Tahun	1,0	0,0	1,0	100.000.000	1,0	200.000.000	1,0	200.000.000	1,0	200.000.000	1,0	200.000.000			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan prasarana pembudidayaan ikan (di peruntukan UPT Perbenihan Ikan)	1,0	0,0	1,0	1.005.000.000	1,0	1.005.000.000	1,0	1.000.000.000	1,0	1.229.081.526	1,0	1.300.000.000			
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah laporan kasus hama, penyakit ikan dan lingkungan yang ditemukan dan ditangani	0,0	0,0	-	0	1,0	200.000.000	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	150.000.000			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana pembudidayaan ikan (jaring, jongkong, benih ikan)	3,0	0,0	3,0	800.000.000	3,0	1.000.000.000	3,0	800.000.000	3,0	900.000.000	3,0	950.000.000			
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Percentase Produksi Pengolahan Perikanan	Jumlah produksi Pengolahan perikanan / target produksi yang ditetapkan (55 ton) *100 %	74	75	78	1.200.000.000	82	367.000.000	91	442.000.000	100	497.000.000	100	780.000.000			
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah Dokumen Penyediaan fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	39	0,0	44	100.000.000	55	17.000.000	49	17.000.000	54	17.000.000	59	200.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	158,0	0,0	168,0	100.000.000	178,0	17.000.000	188,0	17.000.000	198,0	17.000.000	208,0	200.000.000			
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Poklahsar Turbina	Jumlah Poklahsar Turbina	16,0	0,0	18,0	100.000.000	20,0	70.000.000	22,0	100.000.000	24,0	150.000.000	26,0	180.000.000			
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha yang mendapat pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha	1,0	0,0	4,0	100.000.000	5,0	70.000.000	6,0	100.000.000	7,0	150.000.000	8,0	180.000.000			
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana olah perikanan yang dilakukan	jumlah sarana prasarana olahan perikanan yang tersedia/ target sarana prasarana olahan ikan (20 unit) *100%	0,0	0,0	10,0	1.000.000.000	20,0	280.000.000	40,0	325.000.000	60,0	330.000.000	80,0	400.000.000			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan (data ikan segar yang digunakan untuk usaha pengolahan ikan + data konsumsi BPS)	0,0	0,0	0,0	0	0,1	30.000.000	0,1	50.000.000	0,1	30.000.000	0,3	100.000.000			
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang terfasilitasi	0,0	0,0	20,0	1.000.000.000	40,0	250.000.000	60,0	275.000.000	80,0	300.000.000	100,0	300.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (7)*100%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	90,0	90,5	14.544.618.215	14.690.964.397	91,0	91,5	92,0	92,5	14.838.774.041	14.988.061.782	15.138.842.399			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*100% kinerja yang seharusnya tepat waktu*100 %	100,0	100,0	100,0	5.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000	100,0	10.000.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan*100% (Form E.68 Permendagri 86/2017-Renstra & Form E.70 Permendagri 86/2017-Renja)	4,0	4,0	4,0	4.000.000	4,0	4.500.000	4,0	4.500.000	4,0	4.500.000	4,0	4.500.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan dibagi dokumen perencanaan dan laporan kinerja dan hasil	1,0	1,0	1,0	0	1,0	4.500.000	1,0	4.500.000	1,0	4.500.000	1,0	4.500.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang disusun	0,0	0,0	1,0	500.000	1,0	500.000	1,0	500.000	1,0	500.000	1,0	500.000	500.000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0,0	0,0	1,0	500.000	1,0	500.000	1,0	500.000	1,0	500.000	1,0	500.000	500.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%	100,0	100,0	100,0	13.935.813.675	100,0	14.029.215.812	100,0	14.169.001.970	100,0	14.310.185.990	100,0	14.452.781.849			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu/ jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	129,0	129,0	159,0	13.840.213.675	160,0	13.978.615.812	162,0	14.118.401.970	164,0	14.259.585.990	166,0	14.402.181.849			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen jasa administrasi keuangan	1,0	1,0	1,0	95.600.000	1,0	45.600.000	1,0	45.600.000	1,0	45.600.000	1,0	45.600.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan/ jumlah seluruh laporan keuangan*100%	1,0	0,0	0,0	0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	5.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Administrasi Barang Milik Daerah	Percentase pelayanan Administrasi BMD	Percentase pengelolaan BMD yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100%	100,0	100,0	100,0	20.368.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	100,0	20.000.000	20.000.000		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pengelolaan BMD yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya	1,0	1,0	1,0	20.368.000	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	20.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Percentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100%	100,0	100,0	100,0	1.000.000	100,0	23.784.145	100,0	25.784.145	100,0	28.784.145	100,0	30.784.145	30.784.145		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jenis paket Pengadaan pakaian dinas	0,0	0,0	-	0	1,0	20.784.145	1,0	20.784.145	1,0	20.784.145	1,0	20.784.145	20.784.145		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	0,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	3.000.000	1,0	5.000.000	2,0	8.000.000	2,0	10.000.000	10.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan- minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE/ jumlah keseluruhan (8)*100%	100,0	100,0	100,0	161.479.000	100,0	162.126.900	100,0	168.150.386	100,0	168.254.107	100,0	166.128.865	166.128.865		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,0	1,0	1,0	6.479.000	1,0	7.126.900	1,0	7.839.590	1,0	8.623.549	1,0	9.485.904			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,0	1,0	0,0	0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,0	1,0	1,0	10.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,0	1,0	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,0	1,0	1,0	25.000.000	1,0	25.000.000	1,0	25.000.000	1,0	25.000.000	1,0	25.000.000			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,0	1,0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,0	1,0	1,0	100.000.000	1,0	100.000.000	1,0	105.310.796	1,0	104.630.558	1,0	101.642.961			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,0	0,0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/ jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*100%	100,0	100,0	100,0	300.957.540	100,0	325.837.540	100,0	325.837.540	100,0	330.837.540	100,0	339.147.540			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2,0	0,0	0,0	0	1,0	24.880.000	1,0	24.880.000	1,0	24.880.000	1,0	24.880.000			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,0	0,0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	2,0	10.000.000	2,0	10.000.000			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11,0	0,0	13,00	5.000.000	14,0	5.000.000	15,0	5.000.000	16,0	5.000.000	16,0	13.310.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2,0	2,0	2,00	290.957.540	2,0	290.957.540	2,0	290.957.540	2,0	290.957.540	2,0	290.957.540	2,0	290.957.540	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%	100,0	100,0	100,0	105.000.000	100,0	105.000.000	100,0	105.000.000	100,0	105.000.000	100,0	105.000.000	100,0	105.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,0	1,0	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	1,0	50.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,0	1,0	1,0	35.000.000	1,0	35.000.000	1,0	35.000.000	1,0	35.000.000	1,0	35.000.000	1,0	35.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,0	1,0	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	1,0	20.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase barang milik daerah berkondisi baik	Percentase barang milik daerah berkondisi baik	80,0	70,0	80,0	15.000.000	80,0	15.000.000	80,0	15.000.000	80,0	15.000.000	80,0	15.000.000	80,0	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang memiliki izin/ jumlah kendaraan dinas yang dimiliki	70,0	0,0	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	5.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang memiliki izin/ jumlah kendaraan dinas yang dimiliki	70,0	0,0	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	70,0	5.000.000	5.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,0	0,0	33,00	5.000.000	36,0	5.000.000	40,0	5.000.000	44,0	5.000.000	48,0	5.000.000	5.000.000		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (2)*100%	100,0	0,0	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	30.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE/ jumlah keseluruhan (8)*100%	100,0	0,0	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	15.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000	UPT Perbenihan Ikan	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,0	0,0	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	10.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%	100,0	0,0	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	15.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,0	0,0	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (2)*100%	100,0	0,0	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan- minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE/ jumlah keseluruhan (8)*100%	100,0	0,0	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,000.000	UPT Pusat Kescha tan Hewan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,0	0,0	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	10.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%	100,0	0,0	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	15.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,0	0,0	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	10.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (2)*100%	100,0	0,0	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, perjalanan dinas serta dukungan SPBE	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan-minuman, perjalanan dinas, dan pembayaran honor SPBE/ jumlah keseluruhan (8)*100%	100,0	0,0	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,000.000	UPT Balai Benih Pertanian Terpadu	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,0	0,0	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1,0	1.000.000	1.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,0	0,0	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	10.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/ seluruh kebutuhan jasa*100%	100,0	0,0	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	100,0	15.000.000	15.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,0	0,0	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	1,0	10.000.000	10.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,0	0,0	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	1,0	5.000.000	5.000.000		
JUMLAH					22.010.418.215			22.450.626.579			22.890.834.944		23.331.043.308		23.771.251.672		



Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) DPPP dapat dicapai.

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud terdapat dalam tabel 4.3 dan 4.4.

Indikator Kinerja DPPP yang mengacu pada indikator kinerja daerah, tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dibawah ini:

Tabel. 4.3 Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Tukar Nelayan	Indeks	106	106,9	107,7	108,4	108,7	109	
2	Nilai Tukar Petani	Indeks	100	100,7	101	101,3	101,4	101,6	
3	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	55,4	55,51	55,65	55,72	55,83	55,91	
4	Nilai AKIP	Poin	78,1	78,4	78,7	79	79,5	79,8	

Tabel. 4.4 Indikator Kinerja Kunci

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Score pola pangan harapan	Poin	80,5	81	81,5	82	82,5	83	
2	Angka Konsumsi Ikan	Poin	77	78	82	91	100	100	
3	Proporsi luas lahan yang ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Persen	30	32	34	36	39	40	
4	Sarana pertanian yang diberikan	Unit	10	10	10	10	10	10	
5	Prasarana pertanian yang diberikan	Unit	0	1	1	1	1	1	
6	Presentase prasarana pertanian yang digunakan	Persen	100	100	100	100	100	100	



Tabel di atas merupakan komitmen DPPP dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Indikator kinerja utama adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan dengan lebih akurat dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kinerja di bidang pertanian dan perikanan, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja utama yang komprehensif dan relevan untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan. Indikator-indikator ini dirancang untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Pertama, nilai tukar nelayan adalah salah satu indikator kinerja utama yang signifikan dalam mengukur keberhasilan program atau kebijakan di bidang perikanan. Nilai tukar nelayan didefinisikan sebagai rasio antara pendapatan nelayan dari penjualan hasil tangkapan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penangkapan. Target nilai tukar nelayan adalah meningkat dari 106 pada tahun 2025 menjadi 109 pada tahun 2030, menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan dan efisiensi dalam kegiatan penangkapan.

Kedua, nilai tukar petani adalah indikator kinerja utama yang penting dalam mengukur keberhasilan program atau kebijakan di bidang pertanian. Nilai tukar petani didefinisikan sebagai rasio antara pendapatan petani dari penjualan hasil pertanian dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi. Target nilai tukar petani adalah meningkat dari 100 pada tahun 2025 menjadi 101,6 pada tahun 2030, menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan efisiensi dalam kegiatan produksi.

Ketiga, indeks ketahanan pangan adalah indikator kinerja utama yang krusial dalam mengukur kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Target indeks ketahanan pangan adalah meningkat dari 55,4 pada tahun 2025 menjadi 55,91 pada tahun 2030, menunjukkan peningkatan kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Terakhir, nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah indikator kinerja utama yang penting dalam mengukur kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Target nilai AKIP adalah meningkat dari 78,1 pada tahun 2025 menjadi 79,8 pada tahun 2030, menunjukkan peningkatan kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Dengan demikian, indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan di bidang pertanian dan perikanan secara lebih akurat dan efektif, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja di bidang pertanian dan perikanan, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja kunci yang relevan dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan. Indikator-indikator ini dirancang untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Score pola pangan harapan adalah salah satu indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kualitas pola pangan penduduk. Target score pola pangan harapan adalah meningkat dari 80,5 poin pada tahun 2025 menjadi 83 poin pada tahun 2030. Meningkatnya score pola pangan harapan menunjukkan bahwa kualitas pola pangan penduduk meningkat dan lebih seimbang, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Angka konsumsi ikan adalah indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur tingkat konsumsi ikan penduduk. Target angka konsumsi ikan adalah meningkat dari 77 poin pada tahun 2025 menjadi 100 poin pada tahun 2030. Meningkatnya angka konsumsi ikan menunjukkan bahwa penduduk lebih banyak mengonsumsi ikan dan meningkatkan kualitas gizi, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur tingkat persentase luas LP2B yang ditetapkan sebagai wilayah KP2B. Targetnya meningkat dari 30% pada tahun 2025 menjadi 40% pada tahun 2030 sesuai dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya dan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan hingga 100% luas lahan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sarana dan prasarana pertanian adalah indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Target sarana pertanian yang diberikan adalah 10 unit setiap tahun, sedangkan target prasarana pertanian yang diberikan adalah 0 unit pada tahun 2025 dan 1 unit pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, target presentase prasarana pertanian yang digunakan adalah 100% setiap tahun. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan ketersediaan pangan.



BAB V

PENUTUP

Dengan penuh rasa syukur, kami haturkan atas tersusunnya Rancangan Renstra DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas. Dokumen ini merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari internal DPPP maupun mitra terkait, yang telah memberikan kontribusi penting dalam menyusun strategi Pengelolaan perikanan, pertanian dan pangan yang terencana dan terukur. Penyelesaian Renstra ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pembangunan di sektor perikanan, pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) didasari oleh analisis yang komprehensif dan berbasis pada data yang akurat, yaitu analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh DPPP. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi DPPP, seperti sumber daya manusia yang berkualitas, keterbatasan anggaran, kebijakan pemerintah yang mendukung, dan perubahan iklim. Dengan analisis SWOT yang komprehensif, DPPP dapat menciptakan perencanaan lima tahunan yang jelas dan terarah, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan berbagai program yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Renstra DPPP yang berbasis pada analisis SWOT yang komprehensif memiliki implikasi seperti peningkatan efektivitas program, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga Renstra DPPP dapat menjadi panduan yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada renstra ini mengandung kaidah substansial sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di sektor perikanan, pertanian, dan pangan, seperti keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi. Dalam renstra ini juga terkandung kaidah pelaksanaan dimana terdapat aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan pembangunan di sektor perikanan, pertanian, dan pangan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan partisipasi masyarakat.

Renstra ini juga harus dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala. Proses pemantauan dan penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di sektor perikanan, pertanian, dan pangan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran tercapai, serta untuk mengidentifikasi area perbaikan.



Melalui Renstra DPPP yang telah disusun, kami berharap dapat memperjelas arah kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sumberdaya daerah. Dokumen perencanaan ini juga menjadi bahan acuan bersama dan merupakan komitmen semua pelaku pembangunan perikanan, pertanian dan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Salah satu tujuan utama dari rencana strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (DPPP) adalah untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian, dan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, dapat membawa manfaat seperti peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Koordinasi yang efektif melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan di tingkat daerah, pemerintah provinsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kementerian terkait yang memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya, serta masyarakat yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendukung program-program pembangunan. Dengan demikian, koordinasi yang efektif antara berbagai pihak dapat meningkatkan pembangunan perikanan, pertanian, dan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesainya penyusunan Renstra DPPP Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga dengan terwujudnya Renstra ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan pembangunan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih baik.

Tarempa, 15 September 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
PERTANIAN DAN PANGAN,



ROVANIYADI, S.P

Pembina Utama Muda

NIP. 197107262002121005



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 266 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang selaras dengan pencapaian program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Anggaran 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;
b. bahwa berdasarkan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah salah satu tahapanya adalah dengan menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 96);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 104);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Maret 2025



Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Sekretaris Daerah	Ketua Tim
2.	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Tim
3.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
13.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota



Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Sekretaris DPRD	Ketua Tim
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	Anggota
5.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Lampiran III : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Inspektur Daerah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Sekretaris Tim
3.	Inspektur Pembantu Bidang I	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Bidang II	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Bidang III	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang IV	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Inspektorat Daerah	Anggota



Lampiran IV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Anggota
6.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota



Lampiran V : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota



Lampiran VI : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrstruktur Dan Kewilayahhan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Anggota
7.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota



Lampiran VII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
BANDAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua Tim
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Anggota
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Arsiparis Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota



Lampiran VIII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi	Anggota
4.	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Anggota
5.	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan	Anggota
6.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Anggota



Lampiran IX : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota



Lampiran X : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota



Lampiran XI : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota



Lampiran XII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan Pertanahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Anggota



Lampiran XIII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Perhubungan Laut	Anggota
4.	Kepala Bidang Perhubungan Darat	Anggota
5.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Lampiran XIV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Industri dan Sumber Daya Pariwisata	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
5.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Lampiran XV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota



Lampiran XVI : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota



Lampiran XVII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Tim
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5.	Perencanaan Ahli Muda di Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota



Lampiran XVIII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
4.	Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanian	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Anggota



Lampiran XIX : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : Maret 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Anggota
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Anggota
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota
6.	Analis Statistik pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota



Lampiran XX : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
4.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
6.	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Lampiran XXI : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Lampiran XXII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Penataan, Kerjasama dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa	Anggota
5.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota



Lampiran XXIII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Perpustakaan	Anggota
4.	Kepala Bidang Arsip Daerah	Anggota
5.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Lampiran XXIV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua Tim
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Tim
3.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota



Lampiran XXV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIANTAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Siantan	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Siantan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program di Kecamatan Siantan	Anggota



Lampiran XXVI : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 269 Tahun 2025
Tanggal : Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JEMAJA TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Jemaja	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Jemaja	Sekretaris Tim
3.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota



Lampiran XXVII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PALMATAK TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Palmatak	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Palmatak	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program di Kecamatan Palmatak	Anggota



Lampiran XXVIII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIANTAN SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Siantan Selatan	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Siantan Selatan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program di Kecamatan Siantan Selatan	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Lampiran XXIX : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Kute Siantan	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Kute Siantan	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program di Kecamatan Kute Siantan	Anggota



Lampiran XXX : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JEMAJA TIMUR TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Jemaja Timur	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Jemaja Timur	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program di Kecamatan Jemaja Timur	Anggota



Lampiran XXXI : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIANTAN UTARA TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Siantan Utara	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Siantan Utara	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program di Kecamatan Siantan Utara	Anggota



Lampiran XXXII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIANTAN TIMUR TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Siantan Timur	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Siantan Timur	Sekretaris Tim
3.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota



Lampiran XXXIII : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIANTAN TENGAH TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Siantan Tengah	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Siantan Tengah	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program pada Kecamatan Siantan Tengah	Anggota



Lampiran XXXIV : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 266 Tahun 2025
Tanggal : 7 Maret 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN JEMAJA BARAT TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Camat Jemaja Barat	Ketua Tim
2.	Sekretaris Kecamatan Jemaja Barat	Sekretaris Tim
3.	Kepala Sub Bagian Program pada Kecamatan Jemaja Barat	Anggota

